

BAB I

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata merupakan pembangunan pariwisata nasional dan terkait dengan sektor-sektor yang lainnya. Oleh karena itu keberhasilan dari pariwisata turut juga dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu juga Pemerintah Indonesia juga telah bertekad untuk meningkatkan pengembangan pariwisata nasional sebagai salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk memperbesar pemasukan devisa, membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha, serta memacu pembangunan daerah, meningkatkan kegiatan ekonomi, serta memperkenalkan alam dan budaya bangsa Indonesia.

Pengembangan sektor pariwisata juga turut melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan menengah keatas hingga kalangan menengah ke bawah, baik itu dari kalangan pemerintah sendiri, swasta maupun masyarakat biasa. Keikutsertaan masyarakat daerah sekitar lokasi wisata dapat berupa partisipasi secara langsung atau pun tidak langsung. Sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan, hal ini bisa berupa pemeliharaan situasi dan kondisi obyek wisata yang aman dan nyaman, sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut, dan dari sinilah pemerintah dapat memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru yakni bisa berbentuk pelayanan kepada wisatawan yang datang untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di lokasi

peluang pasar dalam bentuk usaha-usaha yang terkait pada kegiatan sarana penunjang pariwisata, dengan demikian obyek wisata mampu memberikan pemasukan kepada masyarakat sekitar obyek lokasi wisata.

Seperti yang diketahui bahwa Negara Republik Indonesia memiliki kekayaan yang bersumber dari alam serta memiliki juga keanekaragaman kebudayaan, adat istiadat, serta keanekaragaman suku bangsa yang berbeda. Dengan melihat potensi-potensi di atas, maka pembangunan dari sektor pariwisata juga perlu mendapatkan yang lebih dari pemerintah.

Keanekaragaman dari bangsa Indonesia inilah dapat menjelaskan sebagai bahan pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa, jika dibandingkan dengan waktu yang lalu.
2. Merosotnya nilai-nilai kita di sektor-sektor non migas
3. Prospek pariwisata yang tetap melihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten.
4. Besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan Garis-garis Besar Haluan Negara bahwasannya pembangunan kepariwisataan itu diarahkan pada kegiatan yang bersifat kegiatan ekonomi, dimana dalam kegiatan ini terkait pada penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan daerah pun dapat meningkat seiring dari

kegiatan pariwisata ini. Tentu saja hal ini dapat tercipta diiringi dengan adanya kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun arah kebijaksanaan pariwisata dalam PJP II adalah:

1. Kepariwisataan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan wilayah
2. Pariwisata nasional harus berwawasan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam secara bulat dan utuh.
3. Kepariwisataan nasional harus memberi kesempatan perusahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi perorangan maupun kelompok masyarakat Indonesia
4. Pembangunan kepariwisataan nasional melibatkan secara aktif berbagai sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat secara terpadu.
5. Pembangunan kepariwisataan nasional, harus diikuti langkah-langkah pencegahan dan penangkalan terhadap dampak negative yang mungkin timbul.
6. Pembangunan kepariwisataan nasional harus secara luas menggerakkan hasil produksi dalam negeri.²

Agar sektor pariwisata dapat menjalankan perannya sebagai mana yang diharapkan oleh pemerintah dunia usaha maupun masyarakat umum menjadi salah satu persyaratan untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Selain itu pembangunan pariwisata dalam kegiatannya hampir menyentuh seluruh segi kehidupan masyarakat, disamping itu kegiatan yang sangat

² Tap MPR No. II/MPR/1993.

dipengaruhi dan memerlukan dukungan masyarakat luas yang terkoordinasi secara mapan.

Dalam kondisi yang sedemikian ini maka dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan hal yang pokok dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada kaitan ini F. Siagian berpendapat bahwa:

“Sesungguhnya pada analisa terakhir persoalan administrasi adalah persoalan manusia, tidak ada kegiatan orang yang dapat berlangsung tanpa manusia, terlepas dari lengkapnya fasilitas, besarnya biaya yang tersedia, moderennya perlengkapan dan majunya ilmu pengetahuan serta mutahirnya teknologi”³

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Arief Budiman:

“Kalau kita renungkan, pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.”⁴

Dari beberapa pendapat diatas sudah menunjukkan betapa pentingnya peranan manusia didalam sebuah organisasi yang didalamnya terdapat berbagai macam latar belakang dan karakter manusia yang dalam hal ini ditunjuk sabagai pegawai atau karyiawan. Ini merupakan tuntunan yang mutlak bagi semua jajaran pemerintah khususnya aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan mutu kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat menunjukan citra yang bagus dalam mengemban tugas-tugas pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Stear yakni:

³ Sondang P. Siagian, *Peranan Staff dalam Management*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hal 5.

“Hasil yang dicapai oleh suatu organisasi adalah tergantung pada kinerja masing- masing pegawai”⁵

Seperti yang diketahui bahwa di kota Palembang daerah yang banyak memiliki daerah potensi wisata, dan dikota Palembang itu sendiri banyak terdapat obyek wisata yang cukup menarik dan memiliki potensi untuk dikembangkan untuk menjadi obyek wisata yang dapat diandalkan agar dapat menarik tambahan pemasukan pendapatan daerah.

Dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata tersebut yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dinas Pariwisata ini bertugas dalam memajukan obyek-obyek wisata yang ada, seperti menyediakan sarana dan prasarana di obyak wisata, dan pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata. Selain itu, Pengembangan kepariwisataan harus dapat memberi sumbangan yang cukup besar terutama dalam bentuk dana cair, Guna untuk membiayai pembangunan daerah yang termanifestasikan dalam PAD. Karena dalam salah satu sumber pembiayaan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah berasal dari PAD dan besar kecilnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah sangat menentukan pelaksanaan otonomi daerah.

Penulis tertarik untuk meneliti kinerja dari Dinas Pariwisata Palembang, dan ingin lebih mengetahui secara rinci bagaimana peranan dari Dinas Pariwisata kota Palembang selama ini, apakah sudah berperan secara optimal atau belum. Selain itu penulis juga tertarik ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Palembang dalam pengembangan

pariwisata dan objek – objek wisata dikota Palembang. Serta hasil apa saja yang telah dicapai oleh Dinas Pariwisata selama ini (2005).

Maka dalam kajian skripsi ini adalah bagaimana kinerja Kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang dalam pengembangan obyek wisata tahun 2005. Dengan mengambil judul ***“ANALISIS KINERJA DINAS PARIWISATA KOTA PALEMBANG DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBYEK-OBYEK WISATA TAHUN 2005”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pariwisata Kota Palembang Dalam Upaya Pengembangan Obyek-Obyek Wisata Tahun 2005?
2. Upaya-upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Merealisasikan Program-program

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis/mahasiswa
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di dinas pariwisata.
 - b. Sebagai wahana dalam menganalisa masalah yang ada dalam dinas pariwisata, serta mampu memberikan alternatif pemecahannya.
2. Untuk dinas pariwisata
 - a. Dapat diketahui kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan oleh dinas pariwisata kota Palembang.
 - b. Adanya kemungkinan baru dari hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan selanjutnya.
3. Untuk dunia ilmu pengetahuan
 - a. Diharapkan bisa menambah pengetahuan kita tentang kinerja dinas pariwisata kota Palembang.
 - b. Bisa menambah referensi/kelelai pengetahuan yang nantinya akan

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Kinerja

Menurut WJS Poerdarminto:

“Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”.⁶

Dan kinerja menurut Suryadi Prawirosendata adalah:

“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”⁷

Jadi kinerja dapat juga diartikan sebagai kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh sekelompok atau individu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang diraih oleh suatu organisasi dan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti berikut ini:

a. Aspek Produktivitas (*Productivity*)

Aspek ini berkaitan dengan perbandingan antara masukan (*input*) dan pengeluaran (*out put*) suatu organisasi. Apabila pengeluaran atau hasilnya lebih besar dari pada masukan atau ongkosnya, maka kondisi ini disebut efisien atau produktivitas tinggi, namun apabila pengeluaran lebih rendah dari pada pemasukannya, organisasinya disebut tidak efisien.

⁶ Poerdarminto, WJS, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 634.

⁷ Suryadi Prawirosendata, *Manajemen Kinerja*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal 10.

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara Karena dengan alasan yang berbeda- beda pula. Suatu perjalanan akan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan, yaitu:⁹

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela dalam artian tidak terjadi karena paksaan
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran.

Untuk lebih jelasnya lagi penyusun akan mencoba untuk menguraikan pengertian dari pariwisata adalah:

Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang bermacam-macam.¹⁰

Pengertian lain tentang pariwisata dikemukakan juga oleh Salah Wahab adalah:

“Suatu aktifitas manusia yang dilakukan oleh manusia secara sadar yang mendapatkam pelayanan yang bergantian antara orang-orang disuatu Negara atau sendiri (diluar negeri), meliputiin pendiaman orang-orang didaerah lain (daerah tertentu suatu Negara atau suatu benua) untuk sementara waktu untuk mencari kepuasan yang beranekaragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.”¹¹

⁹ James Spillane, *Ekonomi Pariwisata*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

¹⁰ Oka Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1985, hal 21.

¹¹ Ibid, 1985, hal 21.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian dari pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari perjalanan tersebut apapun bentuknya harus dikaitkan dengan rekreasi dan orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang sedang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat yang sedang dikunjunginya.

b. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa hal:

1. Segi Ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang pertumbuhan usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah lainnya hal tersebut dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu negara.

2. Segi Seni Budaya

Salah satu dorongan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk rasa ingin tahu, mengagumi dan menyelami seni budaya di daerah yang dikunjungi.

3. Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan

Hubungan yang terjadi antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan membawa nilai-nilai baru dalam arti

.....

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun bentuk dan susunan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Unsur eksekutif (pemerintah daerah) terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, yang meliputi aspek perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan dan lain-lain.
2. Unsur legislatif terdiri atas dewan perwakilan rakyat daerah dan sekretariat DPRD.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah terhadap wilayah lautnya diatur dalam Pasal 18 UU No.32 Tahun 2004. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa daerah mempunyai wewenang mengelola sumber daya di wilayah lautnya. Daerah

2. Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris daerah.
3. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada daerah.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Adapun pengertian dari Definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Kinerja adalah pembahasan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai lembaga pemerintah yang mengkoordinasi program pariwisata dan membantu mensosialisasikan obyek dan daya tarik pariwisata serta memproses perizinan hotel, melatih dan menyelenggarakan pendidikan dan pemandu pariwisata yang pada kinerjanya memiliki kriteria untuk menghasilkan tujuan dan di dalam menjalankan terdapat pengaruh-pengaruh yang datang baik secara internal maupun eksternal yang ada dan terjadi di organisasi.
2. Dinas Pariwisata adalah suatu lembaga yang mengurus kepariwisataan dan kebudayaan. Tugasnya antara lain melakukan pembinaan jasa usaha kepariwisataan dan membantu melakukan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada suatu kota serta melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota.

kehidupan lain, maka manusia akan menghargai nilai-nilai yang dimilikinya.

4. Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan tidak terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya apa bila dibina secara baik justru akan menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan yang baik, atau pun dapat memanfaatkan lingkungan hidup yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk berekreasi menginginkan daerah yang menumbuhkan suasana baru yang jauh dari kebisingan kehidupan sehari-hari.

5. Memperluas lapangan kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang bersifat menyerap kebutuhan tenaga kerja, dan tidak hanya mementingkan tenaga mesin saja, sebagai industri yang sifatnya melayani, maka disamping butuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah, nikmat, dan juga ramah. Apabila rangkaian tersebut dilengkapi tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir dan sebagainya, maka jumlah tenaga kerja yang akan diserap akan lebih banyak lagi

6. Menunjang perbaikan kesehatan dan prestasi kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan sehari-hari, atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya sementara waktu.¹²

c. Sasaran Pariwisata

Secara umum sasaran pariwisata itu ditujukan kepada masyarakat tanpa memandang status sosialnya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan suasana baru, nyaman, lain dari rutinitas sehari-hari. Sasaran bagi pariwisata dibagi menjadi dua macam yaitu:¹³

1. Bagi wisatawan domestik

Adalah bahwa sasaran pariwisata ini ditujukan khusus bagi masyarakat dalam negeri itu sendiri.

2. Bagi wisatawan manca negara

Adalah bahwa sasaran pariwisata ini ditujukan khusus bagi masyarakat manca negara atau seluruh dunia agar mereka tertarik dan mau berkunjung untuk menikmati keindahan dan daya tarik pada suatu obyek wisata.

¹² Pengantar Pariwisata Indonesia, *Direktorat Jendral Pariwisata*, Jakarta, 1979, hal 29.

d. Obyek Wisata

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990, Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Sedangkan pendapat lain mendefinisikan dari obyek wisata adalah: Obyek wisata perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni budaya, sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik yang dikunjungi wisatawan.¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan, obyek wisata adalah tempat yang memiliki daya tarik dan bisa dikunjungi serta bisa dinikmati keindahannya oleh manusia

e. Pengembangan Obyek Wisata

Pengembangan obyek wisata adalah:

Pengembangan berasal dari kata “kembang” menjadi besaran dan menjadi tambah sempurna, memperbaiki. dan obyek adalah sasaran atau tujuan.

Sedangkan wisata adalah kegiatan atau perjalanan atau sebagian dari berbagai kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek wisata”.¹⁵

Pariwisata Indonesia merupakan industri, seperti yang disebutkan dalam instruksi Preside No. 9 Tahun 1969 Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁴ Kamus Istilah Pariwisata.

¹⁵

5. Meningkatkan sekaligus pemerataan pertumbuhan pembanguna di tiap-tiap darah.
6. Meningkatkan usaha-usaha pelestarian budaya nasional dan cinta tanah air.
7. Meningkatkan potensi alam dan budaya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pengembangan daerah tujuan wisata lebih ditekankan pada pembangunan obyek wisata alam dan budaya agar lebih dapat dinikmati oleh wisatawan domestik ataupun wisatawan manca Negara. Disamping itu pengembangan obyek wisata ini juga di maksudkan untuk melestarikan panorama dan budaya Indonesia.

3. Pemerintah daerah

Pasal 1 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

3. Pengembangan pariwisata adalah pembangunan obyek wisata alam dan budaya agar dapat dinikmati oleh wisatawan domestik atau pun mancanegara. Disamping itu pengembangan obyek wisata ini juga dimaksudkan untuk melestarikan panorama dan budaya Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Aspek Produktivitas

- Upaya pemerintah dalam meningkatkan produktifitas.
- kegiatan yang dilaksanakan

2. Aspek kualitas pelayanan

- Keterampilan pegawai mempengaruhi kinerja

3. Aspek responsivitas

- Tanggapan petugas terhadap kebutuhan dan keritikan dari masyarakat.
- Kemampuan petugas dalam memberikan informasi dan melayani permintaan masyarakat.

4. Aspek Responsibilitas

- Pegawai mempunyai dedikasi dan semangat kerja yang tinggi
- Program yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi
- Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dapat dirasakan oleh masyarakat

5. Aspek Professional

- Pengetahuan dan keahlian petugas dapat menunjang kinerja

6. Aspek Akuntabilitas

- Keterbukaan antar pegawai serta pegawai dan masyarakat -
- Pelaksanaan laporan kepada lembaga pengawas dan masyarakat

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu setting, suatu pemikiran, ataupun peristiwa.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Dinas Pariwisata Kota Palembang yang berada di kota Palembang.

Penelitian ini diambil di Dinas Pariwisata Kota Palembang, karena kantor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata yang ada di kota Palembang. Dari observasi awal ternyata penulis banyak menemukan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kota Palembang yang berada di kota Palembang ini belum optimal, Seperti yang yang kita ketahui bahwa setiap dinas pariwisata

²⁰

masih banyak mempunyai kekurangan – kekurangan seperti masih kurangnya kualitas SDM yang handal dalam bidang pariwisata.

Sumber Daya Manusia pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota Palembang per 31 Desember 2005 berjumlah 127 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan serta setatus kepegawaian dapat dilihat dari tabel dibawa ini:

a. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1

Jumlah kepegawaian berdasarkan golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	1	-	2	-	3 orang
II	14	2	2	2	46 orang
II	3	3	15	13	59 orang
IV	6	2	-	-	19 orang

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2

Jumlah kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II b	1 orang
2	Eselon III a	7 orang
3	Eselon IV a	20 orang
4	Fungsional	1 orang
5	Staf	98 orang

Sumber: Dokumentasi dinas pariwisata dan kebudayaan kota Palembang

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2

Jumlah kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II b	1 orang
2	Eselon III a	7 orang
3	Eselon IV a	20 orang
4	Fungsional	1 orang
5	Staf	98 orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3

Jumlah kepegawaian berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S 3	-
2	S 2	4 orang
3	S 1/D IV	33 orang
4	D III	23 orang
5	D II	-
6	D I	12 orang
7	SLTA	52 orang
8	SLTP	1 orang
9	SD	2 orang

Sumber: Dokumentasi dinas pariwisata dan kebudayaan kota Palembang

d. Berdasarkan status kepegawaian

Tabel 1.4

Jumlah pegawai berdasarkan kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	62 orang
2	Honor	65 orang

Dan hasil wawancara dengan Drs. H Hendri Yansyah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, Tanggal 11 Juni 2007.

Dikota Palembang masih kurang terpeliharanya asset dan daya tarik wisata kota Palembang, minat investor masih relatif rendah terutama objek wisata sejarah dan budaya, belum tersedianya tata ruang yang mantap serta kesadaran hukum dan peraturan yang relatif kurang. dan dinas tersebut sangat memerlukan perhatian yang cukup besar dalam kinerja sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas dari pada Dinas Pariwisata tersebut, sehingga dalam upaya mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada di kota Palembang dapat lebih maju. Didasarkan keinginan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh aparatur dalam upaya dan pengembangan obyek-obyek wisata yang ada di Kota Palembang.

3. Unit Analisis

Yang menjadi sumber informasi atau sumber data dalam penelitian ini adalah dinas pariwisata kota Palembang, yang meliputi:

a. Kepala dinas pariwisata kota Palembang

b. ~~Kepala dinas pariwisata kota Palembang~~

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk menguji kebenaran hipotesis diperlukan data yang obyektif.

Adapun data tersebut dapat diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: pengamatan secara langsung di Dinas Pariwisata Kota Palembang dan beberapa obyek pariwisata yang ada di kota Palembang.

b. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data dengan cara mengutip data yang diperlukan penulis yang tersedia di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Contoh: Mengumpulkan data-data yang ada di Dinas Pariwisata Kota Palembang, misalnya dari Renstra, retribusi, jumlah pengunjung, brosur-brosur dan lain-lain yang menyangkut kinerja Dinas Pariwisata Kota Palembang.

c. Wawancara

Adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Contoh: wawancara dengan karyawan

" dan pertanyaan selain itu, bahasa masyarakat

d. Metode kuesioner

Yaitu suatu metode pengambilan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada konsumen untuk diisi, kegunaannya yaitu untuk mendapatkan data tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga data mengenai pendapat/ sikap dari responden.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mencoba untuk memahami makna data, mendapatkan makna. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis ini bersifat induktif, terbuka dan open ended.

Dikatakan terbuka, karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk, Tidak bisa ditentukan terlebih dahulu data apa yang diperlukan pada tahap permulaan, Analisa timbul dengan sendirinya bila dilakukan penafsiran data yang diperoleh. Jadi, semua data dan semua deskripsi mengandung tafsiran. Namun diadakan pembedaan antara data serta semua deskripsi dan data analisis atau tafsiran.

Analisa bersifat induktif mula-mula dikumpulkan data empiris, dari data itu ditentukan pola atau tema dan kelak dikembangkan menjadi teori. Caranya ialah dari yang spesifik kepada yang umum. Namun setelah ditemukan suatu pola maka pola itu masih perlu diisi atau diverifikasi

dengan menguji kebenarannya pada data baru yang spesifik. Dalam melakukan verifikasi itu terlihat kegiatan deduktif.

Adapun salah satu cara, digunakan langkah–langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Laporan–laporan rediksi, dirangkum, dipilih hal–hal yang pokok, difokuskan hal–hal yang penting dicari pola atau temanya. Jadi, laporan sebagai bahan mentah disingkat, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

b. Display Data

Agar dapat melihat gambar atau keseluruhannya atau bagian – bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan berbagai cara martik, grafik, network dan chart. Dengan demikian penelitian dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tunpukan detail.

c. Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Untuk mencari makna data yang dikumpulkan, maka dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal–hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Dari data yang diperoleh, sejak semula dicoba diambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula–mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan tambahan data maka kesimpulan itu lebih grounded (didasarkan atas data). Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru.²¹